

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DESA**
(Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten
Karanganyar)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Penyusunan Skripsi Jenjang Strata I Pada Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
DINAR AJI ATMAJA
B200120026

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DESA**

(Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

DINAR AJI ATMAJA

B200120026

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zulfikar', written over a horizontal line.

Dr. Zulfikar, SE, M.Si

HALAMAN PENGESAHAN

**“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA
(Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten
Karanganyar)”**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA




Yang ditulis oleh:

DINAR AJI ATMAJA

B200120026

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 4 Februari 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji :

1. Dr. Zulfikar, SE, M.si ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Yuli Tri Cahyono, MM, Akt, CA ()
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Dr. Noer Sasongko, SE, M.Si, Akt, CA ()
(Anggota 2 Dewan Penguji)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102

**PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH
PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DINAR AJI ATMAJA**
NIRM : **11.6.106.0230.50026**
Jurusan : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DESA (Studi Kasus di Desa Plesungan
Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah publikasi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa naskah publikasi hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, 27 Januari 2016

Yang membuat pernyataan

(DINAR AJI ATMAJA)

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA

(Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)

ABTRACT

This research aimed to know the village financial management in Plesungan village, subdistrict Gondangrejo, Karanganyar. The method used is descriptive qualitative research and the techniques are research data by depth interviews, observation and documentation. The sample used in this study is the village employees who directly in contact in the village financial statement in Plesungan village, subdistrict Gondangrejo, Karanganyar. The result of the research is that the head of village and the village employees have managed the village financial appropriately to government regulations, it can be proved by there is no improvidence in the village financial. The financial management of Plesungan village shows the transparency from planning, realization, dan responsibility to the people dan the regency and province government. The evidences of receipt note and the cash payment and the village properties are including the SP2D, the receipts of land rental dan market, and the official reports of transferring money to the people.

Keywords: *the village financial management, the village government, the village financial, the village properties, the village fund allocation, APBDesa*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan desa di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Hasil dari penelitian ini Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya telah mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan pemerintah hal ini dibuktikan tidak adanya pemborosan dalam keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Plesungan menunjukkan transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bukti penerimaan dan pengeluaran keuangan dan kekayaan desa berupa SP2D, kuintansi persewaan tanah dan pasar dan berita acara penyerahan uang kepada warga stempat.

Kata Kunci: *Pengelolaan keuangan desa, Pemerintahan Desa, Keuangan Desa, Kekayaan Desa, APBDes*

I. LATAR BELAKANG

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten.

Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Di dalam Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar tahun 2014 terlihat bahwa pemerintahan Desa Plesungan melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik karena tidak adanya pemborosan anggaran oleh pemerintah desa dan adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan kepada masyarakat Desa Plesungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan keuangan desa seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bab 5 yang menyatakan bahwa adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Penelitian terdahulu Hesti (2015) dengan judul : Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman). Tujuan penelitian untuk mengetahui kesiapan desa dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa apabila dilihat dari perencanaan APBDesa, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa, akuntabilitas finansial, dan pengawasan APBDesa. Sampel dalam penelitian ini adalah delapan desa di Kabupaten Sleman,

yaitu desa Girikerto, Wonokerto, Donokerto, Bangunkerto, Jogotirto, Kalitirto, Tegaltirto, dan Sendangtirto. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan desa yang menjadi sampel telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung.

Penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola keuangan dan kekayaan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tata kelola keuangan dan kekayaan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014.

II. KAJIAN LITERATUR

1. Otonomi Desa

Hanif Nurcholis (2011:19) Otonomi Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan.

2. Desa

Pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 mendefinisikan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

4. Keuangan Desa dan Kekayaan (Asset) Desa

a. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN.

b. Kekayaan (Asset) Desa

Pada Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76 menerangkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, Pasar Desa, pasar hewan, tambahan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, Pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa antara lain :

- 1) Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 2) Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
- 3) Kekayaan Desa yang diperoleh dari pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain, sesuai dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Hasil kerja sama Desa
- 5) Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggara yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya.

III. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, dari hasil menyimpulkan definisi yang diajukan para pakar, dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moloeng (2012:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Dengan alasan ini ingin mengetahui seberapa besar transparansi pemerintah Desa Plesungan dalam pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat Plesungan.

3. Subyek Penelitian dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Kantor Desa Plesungan.

4. Instrumen Penelitian

Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan

keuangan dan kekayaan desa, yaitu Pemerintah Desa. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala seksi, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada dipermerintah Desa Plesungan.

5. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui Interview maupun Observasi Berupa identitas respondendan hasil tanggapan responden tentang bagaimana pengelolaan keuangan dan kekayaan di Desa Plesungan.

b. Data sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung yang di peroleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian ini penulis melakukan wawancara Kepada Kepala Desa Plesungan, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa.

b. Observasi

Penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di lapangan melihat proses pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini, berupa data laporan keuangan APBDes dan buku peraturan desa tahun 2014.

7. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaan Desa di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Adapun analisa data dilakukan dengan cara membandingkan metode pengelolaan keuangan dan kekayaan di Desa Plesungan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

IV. HASIL DAN PENELITIAN

Di bawah ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Pendapatan pada tahun 2014 sebesar Rp.604.916.000. Dengan uraian Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 164.100.000, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 12.912.000, Alokasi Dana Desa Rp. 69.726.000, Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 357.428.000 dan juga digambarkan anggaran pengeluaran atau belanja desa Desa Plesungan sebesar Rp.604.166.000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 410.386.200 yang terdiri dari

Belanja Pegawai sebesar Rp.209.828.000, Belanja Kesejahteraan Aparat Desa sebesar Rp. 6.000.000, Belanja Tunjangan sebesar Rp.35.250.000, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp. 159.308.200, dan Belanja Langsung sebesar Rp. 193.779.800 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 22.360.000, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 41.824.800, Belanja Modal sebesar Rp. 129.595.000.

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Plesungan

Kepala Desa Plesungan bernama Bapak Waluyo adalah pemegang kekuasaan di pemerintahan Desa Plesungan untuk pengelolaan keuangan desa dalam kepemilikan kekayaan desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa.
- b. Menetapkan Sekretaris, Kepala Seksi, dan Bendahara.
- c. Menetapkan petugas untuk meminta pungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran APBDDesa untuk keperluan kegiatan desa.

Sekretaris desa bernama Bapak H. Supardi biasanya dipanggil dengan sebutan Carik yang menjadi koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan dan bertugas sebagai :

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggung jawaban pelaksana APBDDesa.
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDesa.
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Kepala seksi Desa Plesungan bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang menjadi rancangan pemerintah desa. Kepala seksi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Kepala seksi pemerintahan yang bernama Bapak Haryanto bertugas sebagai mencatat kependudukan kelahiran, kematian, pembuatan KK, KTP, dan akte kelahiran.
- b. Kepala seksi pembangunan yang bernama Bapak Supardi bertugas untuk mengajukan proposal pembangunan yang akan dibangun dan melaksanakan pembangunan.
- c. Kepala seksi kesejahteraan rakyat yang bernama Bapak Senen Raharjo bertugas untuk mengawasi kesejahteraan rakyat khususnya tentang warga yang ingin mengajukan surat izin pernikahan, talak cerai, jamkesmas.

Bendahara di Desa Plesungan bertugas sebagai menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapat desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Bendahara di Desa Plesungan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan kekuasaannya di pegang oleh Kaur Keuangan dijabat oleh Bapak Yulianto bertugas sebagai mencairkan dana dari Kabupaten,

membukukan dana yang dicairkan, dan menyimpan dana yang sudah dicairkan dari APBDesa.

Sistem dan Proses Pencairan Dana Pemerintah Desa membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RABDes) yang sudah disahkan oleh pemerintah desa dan BPD kemudian diberikan kepada Camat untuk diberikan kepada pemerintah Kabupaten dan kemudian Pemerintah kabupaten mengeluarkan SP2D (Surat Penyediaan Pendanaan Daerah).

b. Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran di Pemerintah Desa kekuasaannya dipegang oleh Kaur Umum dijabat oleh Bapak Joko M. yang bertugas sebagai menyetorkan, menetausahakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa. Sebelum Kaur Umum menerima dana dari Kaur Keuangan terlebih dahulu Kaur Umum mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan diserahkan kepada Kaur Keuangan membaya SPP dan SPM ke Kabupaten Karanganyar untuk mencairkan dana yang harus diterima oleh Desa Plesungan.

Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan dan Kekayaan Desa Plesungan

Bukti keuangan dan kekayaan yang diterima dan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Plesungan antara lain ada :

- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh PPKD DPPKAD Kabupaten Karanganyar untuk mencairkan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- b. Kwitansi persewaan Tanah Kas Desa dan Tanah Bengkok perangkat Desa Plesungan.
- c. Surat Perjanjian persewaan Kios Pasar di Desa Plesungan.
- d. Berita Acara Penyerahan Uang yaitu tanda bukti penyerahan uang dari kasi umum kepada pihak kedua atau ketua pelaksana kegiatan.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan penelitian ini tentang Analisis tata kelola keuangan dan kekayaan pemerintah Desa Plesungan ada yang sudah sesuai dan juga ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang.

- a. Peraturan Desa Plesungan yang sudah sesuai dengan undang-undang
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a) Kedudukan dan jenis Desa Plesungan adalah sebagai desa karena hubungan pemerintah desa dengan masyarakatnya masih sangat akrab.
 - b) Penyelenggaraan dan pemerintahan Desa Plesungan yang dilaksanakan seperti melaksanakan pembangunan, melayani masyarakat, membuat peraturan desa, merencanakan APBDesa dan melaksanakannya.
 - c) Keuangan dan asset Desa Plesungan seperti penghasilan tetap dari hasil sewa tanah kas desa dan pasar desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah

kabupaten dan provinsi, kemudian asset desa berupa tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa.

- d) Pembangunan desa dan pembangunan kawasan Desa Plesungan seperti pembangunan jalan-jalan desa, pembangunan talud jalan, pembangunan jembatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
 - a) Tata cara penyusunan peraturan Desa Plesungan dengan cara mengadakan rapat kepala desa dengan perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk menyusun peraturan-peraturan desa.
 - b) Keuangan dan Kekayaan Desa Plesungan seperti penghasilan tetap dari hasil sewa tanah kas desa dan pasar desa, Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, kemudian asset desa berupa tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa.
 - c) Badan usaha milik Desa Plesungan seperti tanah kas desa, pasar desa yang di sewakan kepada warga setempat.
 - d) Lembaga kemasyarakatan Desa Plesungan berperan sebagai merencanakan dan melaksanakan kegiatan desa seperti pembangunan, PKK, olahraga.
 - e) Pembinaan dan Pengawasan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi kepada Desa Plesungan terhadap Desa Plesungan dan desa-desa yang lain yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan perangkat desa dan penyuluhan tingkat desa dan pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh inspektorat kabupaten.
- 3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
 - a) Asas pengelolaan keuangan Desa Plesungan yang digunakan adalah transparan dan partisipatif
 - b) Kekuasaan pengelolaan keuangan Desa Plesungan dilaksanakan oleh :
 - (1) Kepala Desa Pemerintah Desa Plesungan melaksanakan tugasnya seperti melakukan pengelolaan keuangan Desa, menetapkan kebijakan APBDes, menetapkan sekretaris, bendahara dan kepala seksi Desa, menetapkan tugas untuk meminta pungutan penerimaan Desa.
 - (2) Sekretaris Pemerintah Desa Plesungan sudah melaksanakan tugasnya seperti Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDes, Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksana APBDes, Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan

APBDesa, dan Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- (3) Bendahara Pemerintah Desa Plesungan tata kelolanya sudah sesuai dengan tugasnya, karena di Pemerintah Desa Plesungan sudah ada bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang dipegang oleh Kasi Keuangan dan Kasi Umum kemungkinan SKPD untuk melakukan kecurangan, korupsi, penyelewengan dalam melaksanakan tugasnya sangat kecil karena SKPD sudah mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan porsinya.
- (4) Kepala Seksi Pemerintah Desa Plesungan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan mereka melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsinya masing-masing dari mencatat kelahiran dan kematian, melaksanakan pembangunan, dan mengawasi kesejahteraan masyarakat.
- c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan pemerintah desa merencanakan RAPBDes yang sudah di setuju oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kemudian di ajukan kepada pemerintah Kabupaten melalui camat yang kemudian disahkan menjadi APBDesa.
- d) Pengelolaan keuangan Desa Plesungan sendiri pengelolaan sumber keuangan Desa tidak terlepas dari peranan Kepala Desa sebagai pelaksana sekaligus pengawas atas kegiatan atau usaha desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Pemerintah Desa Plesungan melakukan Pertanggungjawaban di setiap akhir tahun.
- e) Pembinaan dan Pengawasan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi terhadap Desa Plesungan dan desa-desa yang lain yaitu dengan adanya pelatihan-pelatihan perangkat desa dan penyuluhan tingkat desa dan pengawasan pengelolaan keuangan dilakukan oleh inspektorat kabupaten.
- b. Peraturan yang belum sesuai dengan Undang-Undang yaitu dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - 1) Ketentuan khusus di Desa Plesungan belum adanya ketentuan khusus di Desa Plesungan.
 - 2) Sistem administrasi dan informasi desa, masyarakat belum bisa mengakses informasi desa karena pemerintah Desa Plesungan belum menyediakan akses administrasi dan informasi desa .

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya berkaitan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa, saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan pemerintah Desa Plesungan sudah sesuai dengan aturan undang-undang dari segi penyelenggaraan

pemerintahan desa, keuangan dan kekayaan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa pembangunan kawasan perdesaan, dari hal ini pemerintah desa bisa mempertahankan peraturan yang sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan undang-undang.

- b. Di pemerintah Desa Plesungan aturan yang belum sesuai dengan undang-undang yaitu ketentuan khusus desa dan sistem informasi dan administrasi desa, mungkin Desa Plesungan bisa menambahkan ketentuan khusus dan sistem informasi dan administrasi Desa Plesungan untuk menyempurnakan aturan desa dengan aturan undang-undang.
- c. Dari segi sumber daya manusia pemerintah Desa Plesungan seharusnya bisa menguasai komputerisasi agar bisa menjalankan sistem administrasi dan informasi di Desa Plesungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Indri. 2015. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Studi Kasus di Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamidi, jazim dkk, 2011. *Optik hukum peraturan daerah bermasalah*. Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya.
- Kartono, Uji. 2013. *Analisis Pemanfaatan Tanah Kas Desa Pada Desa Sei Sim pang Dua Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. Skripsi, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Lestari, Ayu Komang D; dkk. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah)*. E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Volume 2. Nomor 1.
- Moleong J. Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.PT. RemajaRosdakarya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Permatasari, Kartika; dkk.2013.*Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa(Studi KasusSitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik. Volume 1. Nomor 6. Hal 1213-1219.
- Rahmawati, Hesti Irna. 2015. *Analisis Kesiapan Desa Dalam Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Studi Pada Delapan Desa Di Kabupaten Sleman)*. ISSN 2407-9189.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung. Alfabeta.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung. Alfabeta.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Donggala*. ISSN 2302-2019. E-jurnal katalogis. Volume 3. Nomor 1. Hal 43-53.
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-jurnal Katalogis. Volume 3. Nomor 2. Hal 135-142.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa dan Administrasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2014 Kepala Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 Kepala Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Perturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.